

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian;
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Persama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/p.KY/09/2012;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1983 tentang Hakim Tidak Dapat Dipraperadilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Buku:

- Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung: Armico, 1984.
- Efendi, Jonaedi dan Suharto. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- H.R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Indah, C. Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* Bandung: Alumni, 2006.
- Kelsen, Hans (diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiric*. Jakarta: BEE Media, 2013.
- Kusumahpraja, Reza Kautsar. *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata: Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara*. Banyumas: Amerta Media, 2021.
- Loqman, Loebby. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta: Datacorn, 2002.
- Lubis, M. Sofyan. *Prinsip Miranda: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010.
- Malamassam, Jhon Ilef. *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2012.
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Manalu, Paingot Rambe. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2012.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prakoso, Djoko. *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: FH UI, 1991.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: FH UI, 2007.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1982.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

W.J.S. Poerwandaminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Yulia, Rena. *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal:

Aiswarya, dkk. (2016). *Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 5, No. 6.

Dinda, Claudia Permata, dkk. (2020). *Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tingkat Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. PAMPAS Journal Criminal Law. Vo. 1, No. 2.

Lathif, Nazaruddin. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap*. Jurnal Pakuan Law. Vol. 4, No. 2.

Mahrus, Ali. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Progresif, Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 14, No. 2.

Putra, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-undangan*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 9. No. 6.

Rahardjo, Satjipto. (1998). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol. 1.

Seroy, Hatlyinsyanna. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang Kuhap*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 5, No. 5.

Soplantila, Shynta. (2017). *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 1. No. 10.

Tetepa, Benasto. (2013). *Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 2, No. 7.

Vida, Azaria. (2018). *Ketertarikan Azas Persuption Of Inosense Didalam Pemberitaan Pers*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 7. No. 2.

Internet:

Tribata News (2020). *Tanggung Jawab Penegakan Hukum Indonesia*. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/30/tanggung-jawab-penegakan->

[hukum-indonesia/](https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan), diakses pada hari Minggu, 26 November 2023, pukul 02.10 WIB.

Wikipedia. *Divisi Profesi dan Pengamanan*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pkl. 19.30 WIB.

